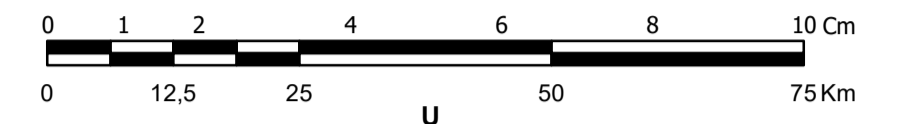


**PETA INDIKATIF AREAL PERHUTAN SOSIAL
PROVINSI JAMBI
(REVISI VIII)**

Skala 1:750.000



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK. 8/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/1/2023
Tanggal : 3 Januari 2023

a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Pit. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

[Signature]
Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 1962031 198802 1 001

LOKASI INDIKATIF DAN AREAL PERHUTAN SOSIAL

- Lokasi Indikatif Perhutanan Sosial
- Areal Perhutanan Sosial
- Hutan Adat

KETERANGAN :

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

- Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
- Kawasan Konservasi Perairan
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Tetap
- Hutan Produksi yang dapat dikonsversi
- Areal Penggunaan Lain

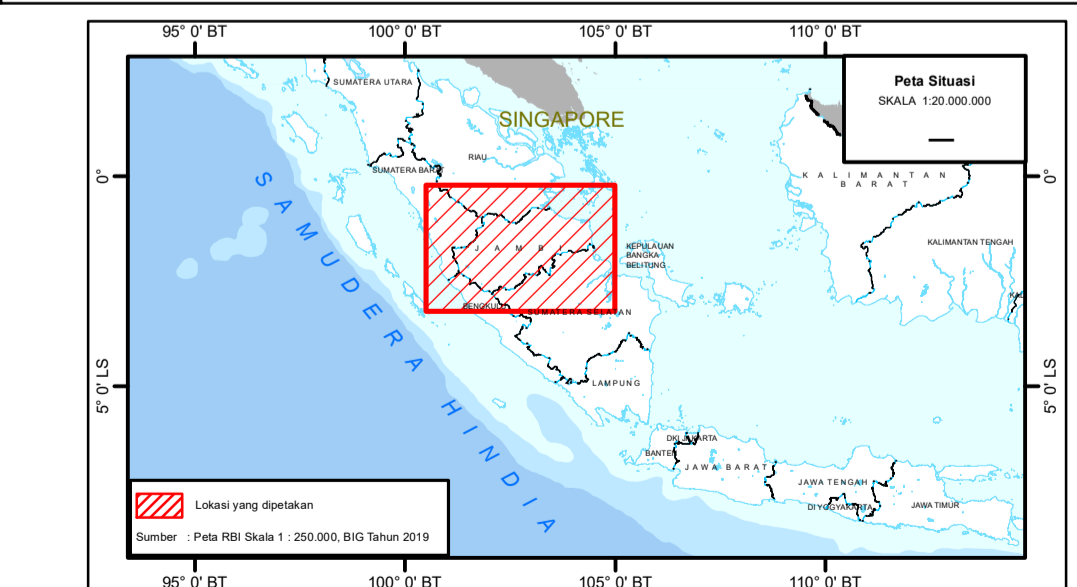
DASAR PEMBUATAN PETA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
2. Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

SUMBER DATA :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 250.000, Badan Informasi Geospasial Tahun 2017.
2. Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 863/Menhut-II/2014)
3. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai Dengan Tahun 2021 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021)
4. Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017)
5. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional tahun 2017 skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017)
6. Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat Fase IV Skala 1:2.000.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.4682/ MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2020)
7. Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5012/MENLHK-PHL/BRPH/HPL.0/6/2022)
8. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.7594/MENLHK-PKTL/IPS DH/PLA.1/9/2022).
9. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Revisi I (Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.5564/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022).
10. Data Izin Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Agustus 2022.
11. Data Pengesahan Penataan Hutan KPHL dan KPHP pada RPHUP sampai dengan Agustus 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Masukan dari masyarakat dan/atau usulan pemerintah daerah.

Keterangan :
Jika terdapat perbedaan batas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2022